

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2023 sebagai rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2023. Dengan demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2023 adalah merupakan gambaran dari serangkaian rencana program, kegiatan yang diurai lebih rinci dalam Sub Kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Untuk itu Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 disusun dengan fokus capaian kinerja berdasarkan kondisi sekarang dan yang akan datang serta dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2022.

Dokumen Rencana Kerja ini nantinya juga merupakan acuan/pedoman bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam melaksanakan tugasnya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota. Sedangkan Rencana Kerja ini tidak akan berarti banyak tanpa implementasi pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Semoga dengan tersusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 ini mampu memberikan manfaat guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel serta dapat dijadikan koreksi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kerja seluruh elemen Sekretariat DPRD Kota Blitar dimasa yang akan datang.

Blitar, 25 Juli 2022

SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR

A circular official stamp of the Secretary of the Blitar DPRD. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR' at the top and 'SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR' at the bottom, separated by stars. In the center, there is a signature in blue ink over a purple stamp. Below the signature, the name 'Dra. EKA ATIKAH' is printed in bold, followed by 'Pembina Utama Muda' and 'NIP. 19680812 198803 2 006'.

Dra. EKA ATIKAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 198803 2 006

DAFTAR ISI

Daftar Isi	Halaman
PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI HASIL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar	35
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar	39
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat.....	52
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR	53
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	53
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Blitar	55
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, LOKASI, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	57
BAB V P E N U T U P	81
5.1. Catatan Penting	81
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	82
5.3. Rencana Tindak Lanjut	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib mengatur dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam 5 (lima) tahun kedepan dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara herarki Rencana Kerja berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 Tahun, yang dijabarkan dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daaerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Sedangkan RPJMD menjadi pedomaan dalam pembuatan atau penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang akan dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah tiap tahun.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Selanjutnya dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- Renstra Perangkat Daerah,
- Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu,
- Hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Lokasi Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran, serta Perkiraan Maju pendanaan;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2022 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar;
3. Memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi, dan Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024;
4. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2023, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD tahun 2023.

1.1.1 Keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan rencana kerja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup penelaahan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Rencana Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Rencana Kerja berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sementara penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mencakup penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2023.

1.1.2 Keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar juga berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar. Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kota Blitar yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Rencana Kerja. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 harus berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga dan Rencana Kerja Provinsi

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Sekretariat DPR RI serta DPRD Provinsi Jawa Timur tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Rencana Kerja Sekretariat DPR RI dan Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Program DPR RI dan DPRD provinsi Jawa Timur yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2023.

1.1.4 Rencana Kerja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023. Sedangkan RKA Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2023 berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 470) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1513);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 590);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008;
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021;
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021;
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kota Blitar pada Tahun 2023 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021-2026 serta disusun dengan tetap mengacu pada RKPD Tahun 2023, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 dijadikan sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS Tahun 2023 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2023. Jadi Renja Sekretariat DPRD Kota Blitar disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah kota Blitar Tahun 2023;
- b. Merupakan pedoman pelaksanaan dalam fasilitasi tugas dan fungsi DPRD dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- c. Sebagai pedoman pelaksanaan Program dan kegiatan yang akan datang dan evaluasi terhadap Program dan kegiatan tahun lalu;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Evaluasi Hasil Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun Lalu. Berisikan tentang :

- 2.1. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar,
- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar,
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar,
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar

2.5. Penelaahan Usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan
pada Sekretariat DPRD Kota Blitar

BAB III : Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Menguraikan mengenai :

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Blitar.

BAB IV : Rencana Program, Kegiatan Indikator, Lokasi, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif.

Menguraikan tentang program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun 2023 disertai dengan pendanaan prakiraan maju tahun 2024.

BAB V : Penutup

Menguraikan tentang :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran,
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan dan
- c. Rencana tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2023.

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar disajikan sebagai salah satu fungsi untuk peningkatan kualitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar di tahun yang direncanakan dengan mengacu pada hasil kinerja tahun lalu guna mengetahui :

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD kota Blitar tahun lalu (2021) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2022) dengan mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPRD Kota Blitar berdasarkan realisasi program, kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada tahun – tahun sebelumnya.

Adapun program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2021 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
 2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan/Event Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 7. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 6. Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 9. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 4. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah AkademikAkademik
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
 10. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD
 4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
 5. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 11. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 1. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
 12. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 1. Sub Kegiatan Pendalaman DPRD
 2. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
 13. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses

- 14 Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Sedang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
 2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan/Event Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6. Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 9. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda
 3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 4. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Akademik
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD
 10. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 1. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
 2. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Sub Kegiatan Pembahasan APBD
 4. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
 5. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 11. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 1. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
 12. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

1. Sub Kegiatan Pendalaman DPRD
2. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
3. Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
5. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
13. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
14. Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 2. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Sebagai fasilitator Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD maka Sekretariat DPRD Kota Blitar pada Renstra 2021-2026 menetapkan tujuan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD”**.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan maka Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD
2. Sasaran 2 : Meningkatkan Fasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan dan Penganggaran Daerah
3. Sasaran 3 : Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah

Untuk mengetahui capaian kinerja pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun lalu (Tahun 2020 dan 2021) dan tahun berjalan (Tahun 2022) serta tahun yang direncanakan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar
Dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar s/d Tahun 2022

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021- 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, Kegiatan, Sub Kegiatan Thn 2022	Perkiraan Rfealisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja thn 2021	Realisasi Renja Thn 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)	11= (10/4)
	Sekretariat DPRD									
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82		100%	100%		80	0	0
4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%		17 dok	17 dok		100%	100%	100%
4.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	28 dok		11 dok	11 dok		7 dok	4 dok	14,29

4.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	48 laporan		7 dok	7 dok		12 dokumen	6 dokumen	12,5
4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%		1 jenis	1 jenis		100%	100%	100%
4.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100.orang/bulan		25 orang	23 orang		25 orang	23 orang	23%
4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adminsitrase kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%		100%	100%		100%	100%	100%
4.02.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dians beserta atribut kelengkapannya	100 paket		25 orang	23 orang		25 orang	23 orang	23%
4.02.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan/Event Daerah	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang		4 event	4 event		4 even/23 orang	2 event/23 orang	23%
4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%		18 jenis	18 jenis		100%	100%	100%

4.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	88 paket		22 jenis	22 jenis		22 jenis	20 jenis	22,73
4.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	212 paket		13 macam	13 macam		13 macam	0	0
4.02.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	156 paket		53 macam	53 macam		53 macam	28 macam	17,95%
4.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	260 paket		65 maca	65 macam		65	32	12,3
4.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	40 paket		13 jenis	13 jenis		13	10	25
4.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	192 dokumen		94 bacaan	94 bacaan		48	24	12,5
4.02.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48 laporan		1518 dos/500 pors	1507 dos/500 pors		12	6	12,5
4.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 laporan		25 kali	17 kali		12	6	12.05
4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%		3 unit	3 unit		100%	0	0

4.02.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas / kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 unit		3 unit	3 unit		1 unit	0	0
4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%		18 jenis	18 jenis		100%	100%	100%
4.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan		108 rekening	108 rekening		108	54	12,5
4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%		18 Jenis	18 jenis		100%	100%	100%
4.02.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	116 unit		16 unit/29 unit	16 unit/29 unit		16 unit/29 unit	9 unit/12 unit	10,34
4.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	356 unit		10 macam	10 macam		15	6	1,68
4.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	52 unit		13 macam	13 macam		13	5	9,6

4.02.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	304 unit		2 macam	2 macam		17	6	1,97
4.02.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%		25 orang	25 orang		100%	100%	100%
4.02.01.2.15.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	100 org/bulan		25 orang	25 orang		25	25	25%
4.02.01.2.15.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	56 paket		25 stel	25 stel		10 macam	8 macam	14,29
4.02.01.2.15.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	100 orang		1 kali	1 kali		25 orang	0	0
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%		100%	100%		100%	100%	100%
4.02.02.2.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%		100%	100%		100%	100%	100%

4.02.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	20 dokumen		5 kali	5 kali		5	0	0
4.02.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40 dokumen		100%	100%		10	2	5
4.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	4 dokumen		20 buku	20 buku		1	0	0
4.02.02.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah AkademikAkademik	Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	8 dokumen		1 NA	1NA		2	0	0
4.02.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun	8 dokumen		50 buku	50 buku		2	0	0
4.02.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%		6 dokumen	6 dokumen		100%	100%	100%
4.02.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	8 dokumen		2 dokumen	2dokumen		0	0	0
4.02.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembahan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	8 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		0	0	0
4.02.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	8 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		0	0	0

4.02.02.2.02.04	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	8 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		0	0	0
4.02.02.2.02.06	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	8 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	25
4.02.02.2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%		100%	100%		100%	100%	100%
4.02.02.2.03.07	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	48 dokumen		70 fasilitasi/ 12 fasilitasi	70 fasilitasi/ 12 Fasilitasi		12 dokumen	6 dokumen	12,5
4.02.02.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%		100%	100%		100%	100%	100%
4.02.02.2.04.02	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	24 dokumen		6 kali	3 kali		25 orang	25 orang	
4.02.02.2.04.03	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	20 dokumen		4 event	4 event		5	5	100^
4.02.02.2.04.04	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	28 orang		7 orang	7 orang		7	4	14,28
4.02.02.2.04.05	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	16 orang		4 orang	4 orang		4 orang	4 orang	
4.02.02.2.04.07	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	4 dokumen		6 kali	6 kali		1 dokumen	0	0

4.02.02.2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%		75 orang/3 dokumen	75 orang/3 dokumen		100%	100%	100%
4.02.02.2.05.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	300 dokumen		3 kali	3 kali		75 dokumen	25 dokumen	33,33
4.02.02.2.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%		100%	100%		100%	100%	100^%
4.02.02.2.08.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 dokumen		10 kali	10 kali		10 kali	6 kali	
4.02.02.2.08.02	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	4 laporan		2 buku	2 buku		1 dokumen	0	0

Penjelasan Tabel 2.1. bahwa Capaian Target Kinerja pada tahun 2020 tidak disediakan karena Program, Kegiatan tidak sama dengan tahun 2021 dan tahun 2022, sedang Program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021 disediakan data sesuai Tabel 2.1, dan untuk menggambarkan bahwa capaian Program kegiatan, sub kegiatan pada tahun 2022 disampaikan bahwa sasaran dari tujuan belum tercapai karena belum dilaksanakan survey kepuasan anggota DPRD secara menyeluruh terhadap hasil fasilitasi tugas dan fungsi DPRD oleh Sekretariat DPRD Kota Blitar.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar

Analisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Blitar didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar yang tercantum dalam Peraturan WaliKota Blitar Nomor 5 Tahun 2021, yaitu :

1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar terhadap dukungan tugas DPRD antara lain adalah :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dilihat dari fungsi Sekretariat DPRD maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Sekretariat DPRD terbagi atas 2 jenis yaitu :

1. Fungsi Sekretariat DPRD sebagai pelayanan manajemen administrasi kegiatan DPRD yaitu meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan terhadap DPRD,
2. Fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi DPRD dalam meningkatkan kualitas tri fungsi DPRD yaitu meningkatnya kualitas kinerja fungsi DPRD

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi diatas Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagai unsur pelayanan dan fasilitator tugas dan fungsi dewan, maka keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan rencana kerja yang akan dilaksanakan. Untuk itu sebagai bahan evaluasi dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2021, maka ditetapkan target tingkat capaian kinerja pelayanan yang dijadikan tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pencapaian pelayanan kinerja secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

**Pencapaian Pelayanan Kinerja Sekretariat DPRD
Kota Blitar Tahun 2020-2022**

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD			100%	80	80,5	81	100%	Nilai IKM tahun 2022 belum ada karena belum dilaksanakan SKM	80,5	81	Sesuai dengan formulasi capaian target bahwa capaian IKM bisa diketahui apabila Sekretariat DPRD telah melaksanakan survey kepuasan terhadap fasilitasi anggota DPRD.
2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan anggaran daerah			100%	80	80,5	81	100%	Nilai IKM tahun 2022 belum ada karena belum dilaksanakan SKM	80,5	81	Hal ini belum keseluruhan dicapat karena ada kegiatan yang sesuai peraturan perundang-undangan dijadwalkan pada TB.IV, sehingga Capaian target belum bisa diketahui

Pada Tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2021 dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagai unsur pelayanan dan fasilitator untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dapat dikatakan berhasil, namun namun pada tahun 2022 belum bisa diukur karena belum dilaksanakan SKM secara menyeluruh dari kedua unsur Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Blitar . Dalam hal ini kedepan Sekretariat DPRD Kota Blitar akan tetap meningkatkan kinerjanya agar tercapai target yang lebih baik dari apa yang telah dicapai sekarang.

Tabel 2.2.2
RENCANA CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN PROGRAM
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
(SESUAI RENSTRA TAHUN 2022-2026)

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN					PROGR AM	INDIKATO R PROGRA M	TARG ET PROG RAM	PAGU	TARG ET PROG RAM	PAGU	TARG ET PROG RAM	PAGU	TARG ET PROG RAM	PAGU	TARG ET PROG RAM	PAG U
						2022	2023	2024	2025	2026			2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas fasilitas Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitas Sekretariat DPRD bagi peningkatan Kinerja DPRD	Meningkatnya fasilitas fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitas pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	80	80,5	81	81,5	82	Program Dukungan Pelaksnaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	13.742.406.300	100%	14.525.554.475	100%	15.224.667.867	100%	15.822.506.969	100%	16.227.119.025

				Meningkatnya Fasilitas fungsi pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitas fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	80	80,5	81	81,5	82		Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100%		100%		100%	100%		100%		
				Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah minimal A	A	A 85	A 85,5	A 86	A 86,5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	19.915.011.463	80,5	19.221.678.857	81	20.121.744.792	81,5	23.190.610.332	82	22.800.848.641

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar

Sejauh ini tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Blitar pada Tahun 2021 telah memenuhi target yaitu sasaran 1 tercapai 100% dari rencana target 100%, sasaran 2 tercapai 100% dari rencana target 100% dan sasaran 3 dengan hasil nilai IKM adalah 80,83 dari rencana target 80, artinya capaian target pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan rencana target yang telah ditetapkan.

Sedangkan tahun 2022, sampai dengan Tri bulan II (Bulan Januari sampai dengan Juni 2022) secara keseluruhan telah terealisasi 35,15% dari target realisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar sebesar 50% dengan rincian program utama yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp. 12.875.463.700,- realisasi Rp. 3.823.904.112 atau 29,70 %, sedang program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebesar Rp. 20.923.329.224,- terealisasi sebesar Rp. 8.057.196.453,10 atau 38,51%. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sampai dengan Tribulan II Tahun 2022 (Januari s/d Juni) adalah :

1. Tugas Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah sebagai fasilitator/pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target kinerja tergantung dari berjalan atau tidaknya rencana kegiatan DPRD Kota Blitar dan konsistensi dalam pelaksanaan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan pada Tribulan III dan IV.

Adapun Isu – isu strategis yang digunakan sebagai catatan dalam menentukan perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan mengacu pada tujuan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar yaitu “ Meningkatkan Kualitas Fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD” adalah :

- a. Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai fasilitator perlu dilakukan peningkatan SDM aparatur dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- b. Optimalisasi peran dan fungsi lembaga Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta peningkatan kapasitas DPRD dan berupaya menyamakan persepsi/kesepahaman

dengan DPRD dalam menyikapi perkembangan peraturan perundang undangan.

Dalam menjawab permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023, maka Sekretariat DPRD Kota Blitar mengambil langkah-langkah kebijakan dan solusi antara lain :

1. Mengawal dan menjaga konsistensi rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaannya tepat waktu.
2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dan meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Meningkatkan peran bagian-bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Dalam proses rancangan perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, ada beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa perubahan jumlah anggaran untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat DPRD Kota Blitar
Tahun 2023

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir)					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,5	19.915.011.465	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	20.738.510.419	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	36.379.245	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	36.582.818	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	18.411.645	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	17.505.950	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan	12	17.967.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12	19.076.868	

		iktisar realisasi kinerja SKPD								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.129.816.563	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	2.866.684.755	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	3.129.816.563	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	2866.684.755	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	112.332.990	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	125.931.900	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dians beserta atribut kelengkapannya	25 paket	20.475.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dians beserta atribut kelengkapannya	25 paket	32.500.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 orang	91.857.990	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 orang	93.431.900	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daaerah sesuai standar	100%	1.089.479.460	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daaerah sesuai standar	100%	755.102.132	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	22 paket	61.815.075	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	22 paket	56.414.125	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	53 paket	264.770.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	53 paket	135.516.301	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	39 paket	116.869.305	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	39 paket	56.796.800	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	65 paket	110.010.075	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	65 paket		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 paket	195.917.190	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 paket	132.357.956	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	48 dok	20.280.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	48 dok	28.800.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	96.422.235	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	98.103.200	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	223.395.480	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	247.113.750	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Barang Milik Daerah yang	100%	3.400.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Barang Milik Daerah yang	100%	1.981.931.042	

		terpenuhi sesuai kebutuhan					terpenuhi sesuai kebutuhan			
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		jumlah paket mebel yang disediakan	218 unit	942.198.758	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		jumlah paket mebel yang disediakan	218 unit	942.198.758	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	24 unit	267.071.931	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	24 unit	267.071.931	
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	3.400.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	772.660..353	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	240.651.384	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	1.080.918.384	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	240.651.384	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang terbayarkan	12 laporan	239.571.384	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	841.347.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	841.347.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	997.683.865	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	901.087.813	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29 unit	417.790.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29 unit	418.469.663	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	89 unit	99.585.885	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	89 unit	105.685.100	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	252.918.750	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	228.235.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	76 unit	227.388.630	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	76 unit	148.698.050	
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Prosentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	13.615.335.350	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Prosentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	12.990.271.575	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25 orang/bulan	13.211.575.100	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25 orang/bulan	12.608.444.000	

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	14 paket	328.760.250	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	14 paket	306.827.575	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	25 orang	75.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	25 orang	75.000.000	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	10.567.940.590	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	12.396.541.381	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	3.075.809.700	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	2.521.612.896	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	5 dokumen	165.312.945	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	5 dokumen	159.285.200	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	2.643.457.005	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	2.110.627.696	

Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1 dokumen	12.000.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1 dokumen	75.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	2 dokumen	239.053.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	2 dokumen	150.000.000	
Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun	2 dokumen	4.793.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah penggandaan buku Tata Tertib / Peraturan DPRD	2 dokumen	26.700.000	
Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	1.833.753.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	1.795.616.979	
Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	358.230.000	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	355.692.422	
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	2 dokumen	401.220.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah dokumen hasil pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	2 dokumen	366.292.047	
Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 dokumen	178.490.000	Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 dokumen	276.886.984	

Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2 dokum en	152.640.000	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	2 dokum en	313.329.914	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2	743.173.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2	483.415.612	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	170.416.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	650.661.931	
Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	12 dokum en	170.416.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	12 dokum en	248.598.500	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 dokum en	-			Jumlah Rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 dokum en	402.063.431	
Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	2.691.362.000	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	2.996.008.367	
Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 dok	1.445.717.000	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 dok	1.656.061	

Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	5 dokumen	472.782.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	5 dokumen	480.047.367	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7 orang	263.298.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7 orang	296.070.000	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	4 orang	233.100.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	4 orang	228.000.000	
Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1 dokumen	276.465.000	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1 dokumen	335.830.000	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	1.211.074.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	1.069.005.461	
Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	75 dokumen	1.211.074.000	Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	75 dokumen	1.069.005.461	
Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	4.506.777.000	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	3.363.635.747	

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 laporan	4.450.415.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 laporan	3.304.785.747	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	1 laporan	56.362.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	1 laporan	58.850.000	
Jumlah				30.482.952.055	Jumlah				33.135.051.800	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berbeda dengan Perangkat Daerah lainnya pada Sekretariat DPRD Kota Blitar tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan kepada Sekretariat DPRD Kota Blitar, hal ini disebabkan karena Sekretariat DPRD Kota Blitar merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya sebagai fasilitator terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi Sekretaris DPRD bertanggungjawab kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah. Untuk itu usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 sebagaimana berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Pada Sekretariat DPRD Kota Blitar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		N I H I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yaitu Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik, sedangkan Prioritas Kebijakan Daerah Kota Blitar yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan arah kebijakan nasional tahun 2023 dan mendukung mewujudkan Misi Kota Blitar dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar berkewajiban melakukan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2023.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Dengan dirumuskannya tujuan, maka Sekretariat DPRD Kota Blitar memiliki arah untuk melaksanakan rencana kerja dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya, sumber dana (anggaran) dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing misi dan tujuan. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar utama dalam pengendalian dan pemantauan pencapaian kinerja.

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023 yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2022-2026 adalah **“Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD”**, dengan indikator **“Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD”**, serta sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah dan peningkatan kapasitas DPRD.
- 2) Meningkatnya fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran daerah.
- 3) Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya disajikan Tujuan dan Sasaran serta target capaian kinerja pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
TUJUAN, SASARAN DAN TARGET KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR
TAHUN 2023

(Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2021-2026)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	FORMULA PENGHITUNGAN
Meningkan ya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkata n kinerja DPRD	Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan Kinerja DPRD			80,5	rata – rata nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD,IKM Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)
		Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap Fasilitasi pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	80,5	Rata-rata nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD)
		Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	80,5	Rata-rata nilai IKM Fasilitasi Sekretaraiat DPRD (IKM Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah minimal A	A (85)	Hasil evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kota Blitar

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, LOKASI, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program, kegiatan, Sub Kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

A. Faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023, yaitu :

- a. RPJMD dan RKPD Kota Blitar Tahun 2023.
- b. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Blitar.
- c. Hasil Pemetaan sesuai dengan Permendagri RI Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

B. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun 2023 adalah 2 program, 14 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Lokasi, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Sekretariat DPRD Tahun 2023

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
KOD E REK ENI NG	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Th. 2023	PAGU 2023 (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Kelom pok Sasara n	Target Capaia n Kinerja Th. 2024	PAGU 2024 (Rp.)
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretari at DPRD Kota Blitar				33.135.051.800	SEKRETARIAT DPRD	Sekretarai at DPRD Kota Blitar				31.020.060.200
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sekretariat DPRD Kota Blitar	80,5	20.738.510.419	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sekretariat DPRD Kota Blitar	80,5	18.144.596.500
4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	36.582.818	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	36.635.300

4.02.0 1.2.01. 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Sekretariat DPRD Kota Blitar	7 dokumen	17.505.950	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Sekretariat DPRD Kota Blitar	7 dokumen	17.534.900
4.02.0 1.2.01. 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	12 laporan	19.076.868	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	12 laporan	19.100.400
4.02.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	2.866.684.755	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	2.866.684.755
4.02.0 1.2.02. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Sekretariat DPRD Kota Blitar	25 orang/bulan	2.866.684.755	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Sekretariat DPRD Kota Blitar	25 orang/bulan	2.866.684.755
4.02.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Persentase pelayanan adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	125.931.900	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Persentase pelayanan adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	106.981.800

4.02.0 1.2.05. 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah paket pakaian dians beserta atribut kelengkapannya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	25 paket	32.500.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah paket pakaian dians beserta atribut kelengkapannya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	25 paket	19.500.000
4.02.0 1.2.05. 10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan/Event Daerah	Sekretariat DPRD Kota Blitar	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	25 oran	93.431.900,00	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan/Event Daerah	Sekretariat DPRD Kota Blitar	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	25 oran	87.483.800
4.02.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	755.102.132	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase Daerah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	622.820.000
4.02.0 1.2.06. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	22 paket	56.414.125,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	22 paket	56.416.700
4.02.0 1.2.06. 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	53 paket	135.516.301,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	53 paket	455.099.900
4.02.0 1.2.06. 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	39 paket	56.796.800,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	39 paket	111.303.400
4.02.0 1.2.06. 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar		-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	65 paket	

4.02.0 1.2.06. 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	10 paket	132.357.956,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	10 paket	186.587.400
4.02.0 1.2.06. 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	48 dokumen	28.800.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	48 dokumen	20.280.000
4.02.0 1.2.06. 08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Sekretariat DPRD Kota Blitar	12 laporan	98.103.200,00	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Sekretariat DPRD Kota Blitar	12 laporan	91.830.700
4.02.0 1.2.06. 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	12 laporan	247.113.750,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	12 laporan	212.757.600
4.02.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	1.981.931.042	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	
4.02.0 1.2.07. 01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas / kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas / kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	-	
4.02.0 1.2.07. 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Sekretariat DPRD Kota Blitar	jumlah paket mebel yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	218 unit	942.198.758,00	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Sekretariat DPRD Kota Blitar	jumlah paket mebel yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	218 unit	-

4.02.0 1.2.07. 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	24 unit	267.071.931,00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	24 unit	-
4.02.0 1.2.07. 09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	1 Unit	772.660.353,00	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	1 Unit	-
4.02.0 1.2.07. 11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	10 unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	10 unit	-
4.02.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	1.080.918.384	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	870.201.384
4.02.0 1.2.08. 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	12 laporan	239.571.384,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	12 laporan	240.651.384
4.02.0 1.2.08. 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	12 laporan	841.347.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	12 laporan	629.550.000
4.02.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	901.087.813	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	930.135.461

	Pemerintahan Daerah											
4.02.0 1.2.09. 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	29 unit	418.469.663,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	29 unit	417.790.600
4.02.0 1.2.09. 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	89 unit	105.685.100,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	89 unit	94.829.900
4.02.0 1.2.09. 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	13 unit	228.235.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	13 unit	240.875.000
4.02.0 1.2.09. 11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	76 unit	148.698.050,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	76 unit	176.639.961
4.02.0 1.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	12.990.271.575	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	

4.02.0 1.2.15. 01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	25 orang/bulan	12.608.444.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	25 orang/bulan	11.811.575.100
4.02.0 1.2.15. 02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Anggota DPRD Kota Blitar	14 paket	306.827.575	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	Anggota DPRD Kota Blitar	14 paket	313.105.000
4.02.0 1.2.15. 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	75.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	75.000.000
4.02.0 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	12.396.541.381	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	12.199.680.100
4.02.0 2.2.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	2.521.612.896	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	11.811.575.100

4.02.0 2.2.01. 01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Anggota DPRD Kota Blitar	5 dokumen	159.285.200	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Anggota DPRD Kota Blitar	5 dokumen	157.440.900
4.02.0 2.2.01. 02	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Anggota DPRD Kota Blitar	10 dokumen	2.110.627.696	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Anggota DPRD Kota Blitar	10 dokumen	2.229.886.50 0
4.02.0 2.2.01. 03	Sub Kegiatan Penyelenggara an Kajian Perundang- Undangan	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen kajian perundang- undangan	Anggota DPRD Kota Blitar	1 dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen kajian perundang- undangan	Anggota DPRD Kota Blitar	1 dokumen	12.000.000
4.02.0 2.2.01. 04	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ket erangan dan/atau Naskah AkademikAkad emik	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterang an dan/atau Naskah AkademikAkademik	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	225.000.000
4.02.0 2.2.01. 05	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dok	26.700.000	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen Tata Tertib yang disusun	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dok	17.895.000
4.02.0 2.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	1.795.616.979	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	
4.02.0 2.2.02. 01	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	355.692.422	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	373.336.100

4.02.0 2.2.02. 02	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	366.292.047	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	378.325.300
4.02.0 2.2.02. 03	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	276.886.984	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	178.376.100
4.02.0 2.2.02. 04	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	313.329.914	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	393.499.900
4.02.0 2.2.02. 06	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungja waban APBD	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungja waban APBD	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	483.415.612	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungja waban APBD	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	483.303.800
4.02.0 2.2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	650.661.931	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	412.067.900
4.02.0 2.2.03. 07	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Anggota DPRD Kota Blitar	12 dokumen	248.598.500	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Anggota DPRD Kota Blitar	12 dokumen	170.416.000
4.02.0 2.2.03. 08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungja waban Kepala Daerah	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawa ban kepada daerah	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	402.063.431	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawa ban kepada daerah	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	241.651.900

4.02.0 2.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	2.996.008.367	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	2.746.745.800
4.02.0 2.2.04.01	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	dokumen		Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	dokumen	250.000.000
4.02.0 2.2.04.02	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	6 dokumen	1.656.061.000,00	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	6 dokumen	1.248.043.000
4.02.0 2.2.04.03	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	Anggota DPRD Kota Blitar	5 dokumen	480.047.367,00	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	Anggota DPRD Kota Blitar	5 dokumen	476.300.800
4.02.0 2.2.04.04	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	Anggota DPRD Kota Blitar	7 orang	296.070.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	Anggota DPRD Kota Blitar	7 orang	291.814.000
4.02.0 2.2.04.05	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	4 orang	228.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	4 orang	222.000.000
4.02.0 2.2.04.07	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	1 Dok	335.830.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	1 Dok	258.588.000

4.02.0 2.2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	1.069.005.461	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	1.211.072.700
4.02.0 2.2.05. 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	Anggota DPRD Kota Blitar	75 dokumen	1.069.005.461	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	Anggota DPRD Kota Blitar	75 dokumen	1.211.072.700
4.02.0 2.2.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	3.363.635.747	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	4.306.513.700
4.02.0 2.2.08. 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	12 dokumen	3.304.785.747	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Anggota DPRD Kota Blitar	12 dokumen	4.256.513.700
4.02.0 2.2.08. 02	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretari at DPRD Kota Blitar	Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	Anggota DPRD Kota Blitar	1 dokumen	58.850.000	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretarai at DPRD Kota Blitar	Jumlah laporan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	Anggota DPRD Kota Blitar	1 dokumen	50.000.000

Sebagai evaluasi terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan kebijakan selama Tahun Anggaran 2021 maka disampaikan saran dan langkah – langkah perbaikan sebagai solusi permasalahan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendorong seluruh alat kelengkapan DPRD untuk menyusun Rencana Kerja DPRD sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD dan konsisten dalam pelaksanaannya.
 - b. Memberikan saran dan masukan kepada Pimpinan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Blitar agar konsisten dalam pelaksanaan pembahasan Propemperda yaang telah disusun dan ditetapkan dalam Keputusan DPRD.
 - c. Memberikan pemahaman kepada Anggota DPRD Kota Blitar agar dalam memberikan penilaian terhadap SKM Sekretariat DPRD Kota Blitar agar sesuai dengan regulasi dan standar operasional prosedur fasilitasi anggota DPRD.
 - d. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM/ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD dengan melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah antara lain melalui workshop, Bimtek, Seminar, Kursus dan penugasan pendampingan-pendampingan kunjungan kerja DPRD dan pembahasan-pembahasan pelaksanaan tugas DPRD dengan Tenaga Ahli.
 - e. Selalu meningkatkan komunikasi internal dan eksternal antara Sekretariat DPRD dengan DPRD dan Instansi terkait sebagai Mitra Kerja.
 - f. Menyediakan basis data/database untuk memudahkan proses perencanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan maupun hasil kinerja.
 - g. Meningkatkan fasilitasi dukungan kinerja DPRD dengan Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik (SPSE) : e-RADAR
-

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2023 sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Kota Blitar dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2023. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2022.

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai peran yang sangat strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kota Blitar akan dilaksanakan secara terpadu dan sinkron antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD Kota Blitar

Apabila dalam hal pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2023 menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 maka akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran maka Sekretariat DPRD Kota Blitar menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yaitu :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
3. Pemantauan/monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar yang semakin kompleks, maka perlu adanya rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Blitar yang semakin kompleks melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Sekretariat DPRD Kota Blitar.
2. Sebagai fasilitator maka Sekretariat DPRD akan mengintensifkan koordinasi dengan DPRD untuk menciptakan kesepahaman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga tercipta harmonisasi antara Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan DPRD Kota Blitar dalam mendukung dan memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
3. Rencana Kerja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dengan tetap berdoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023.

Akhirnya, Setelah ditetapkan Rencana Kerja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2023, juga digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Blitar, 25 Juli 2022

SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR



Dra. EKA ATIKAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 198803 2 006